

**RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2023**



SELONG, 03 JANUARI 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya juaah maka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk memberikan gambaran dan arahan mengenai Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan Rencana Kerja ini, dan diharapkan mampu mempercepat pencapaian Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yaitu ***“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal”***.

Selong, 03 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



BAIQ FARIDA APRIANI, S.Sos.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670422 198803 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Gambaran Umum Dishub Kabupaten Lombok Timur	3
1.4. Kepegawaian	7
BAB II PERENCANAAN STRATEJIK	
2.1. Visi dan Misi	9
2.2. Tujuan	10
2.3. Strategi	10
2.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	11
BAB III RENCANA KINERJA	
3.1. Sasaran	15
3.2. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan	16
BAB IV JADWAL PELAKSANAAN	
4.1. Pelaksana Bidang Sekretariat	19
4.2. Pelaksana Bidang LLAJ dan Pengembangan dan Teknik	20
BAB V PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kabupaten Lombok Timur selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 - 2023 yaitu **“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN”**. Pernyataan visi tersebut merupakan suatu pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan. Visi Kabupaten Lombok Timur memiliki Makna sebagai berikut :

- Lombok Timur Adil :
Hal ini bermakna perlakuan terhadap masyarakat di Kabupaten Lombok Timur tidak berat sebelah kepada satu golongan tertentu karena semuanya tergantung pada aspek kebenaran, kebaikan dan kepatutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan
- Lombok Timur Sejahtera :
Hal ini bermakna pembangunan di Kabupaten Lombok Timur memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang termarginalkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.
- Lombok Timur Aman :
Hal ini bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak, difabel dan masyarakat miskin.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien dan sekaligus untuk menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan Kabupaten Lombok Timur memerlukan akselerasi pembangunan wilayah dan pematapan perkembangan kehidupan bermasyarakat yang bertakwa dan berdaya saing. Dan dalam upaya pelaksanaan sistem pemerintahan yang bersih dan

akuntabel, maka setiap pengelola pemerintah diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana kerja kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur tahun 2018-2023 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan mempunyai:

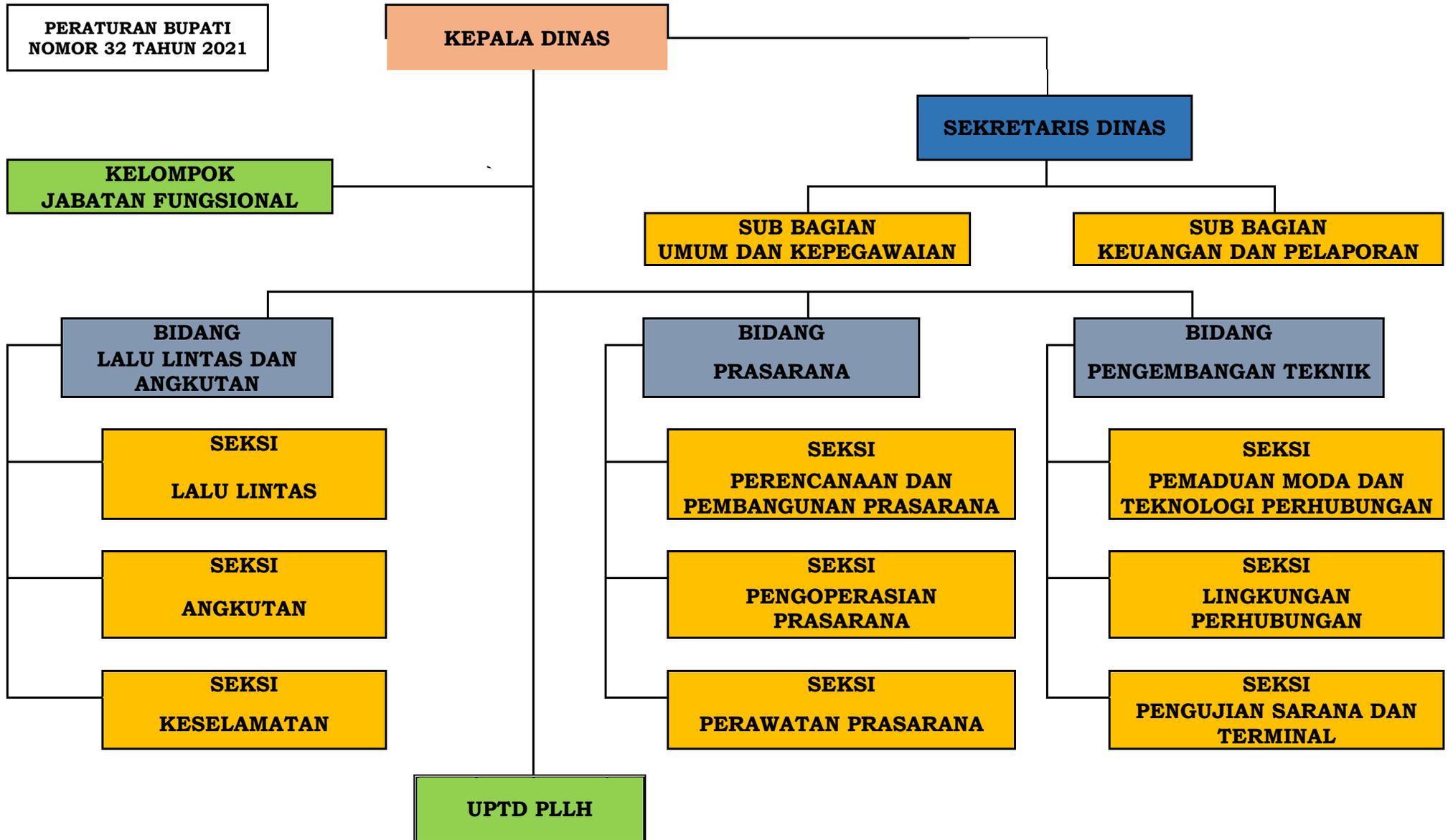
1.3.1. Struktur Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari
 - 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub bagian Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan; dan
 - 3) Seksi Keselamatan.
- d. Bidang Prasarana, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - 2) Seksi Pengoperasian Prasarana;
 - 3) Seksi Perawatan Prasarana.
- e. Bidang Pengembangan Teknik, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - 2) Seksi Lingkungan Perhubungan;
 - 3) Seksi Pengujian Sarana dan Terminal.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung).

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dapat dijabarkan sebagai berikut

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



1.3.2. Tugas pokok dan Fungsi masing-masing sub unit sebagai berikut:

1.3.2.1. Tugas Pokok

Tugas pokok masing-masing sub unit adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas;
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan;
3. Bidang Prasarana mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana.
4. Bidang Pengembangan dan Teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan teknik.

1.3.2.2. Fungsi

Fungsi masing-masing sub unit adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- b. penyusunan konsep rencana strategis Dinas;
- c. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan;
- d. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- e. penataan organisasi dan tata laksana;

- f. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- h. penyelenggaraan penilaian kinerja di lingkup Dinas;
- l. penyusunan konsep kebijakan Dinas untuk pengelolaan program dan pelaporan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sarana dan Prasarana Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan pengujian sarana dan terminal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan pengujian sarana dan terminal;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan pengujian sarana dan terminal; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur keadaan per 03 Januari 2023 berjumlah 295 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 48 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 45 orang dan perempuan berjumlah 3 orang. Sedangkan pegawai Non PNS berjumlah 247 orang yang terdiri 220 orang laki-laki dan 27 orang perempuan.

Jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan status pegawai dan Tingkat pendidikan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Jumlah karyawan/karyawati berdasarkan tingkat pendidikan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur keadaan 03 Januari 2023

No	Status Pegawai	SD	SMP	SMA	DII	DIII	S1	S2	Jumlah
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
1.	PNS	-	-	15	-	4	21	2	42
2.	Non PNS	-	4	192	1	18	44	-	259
Jumlah		-	4	207	1	22	65	2	301

Berdasarkan tabel diatas, keberadaan Sumber Daya Manusia pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur termasuk sangat memadai untuk menangani berbagai persoalan perencanaan lingkup Dinas Perhubungan dengan jumlah pegawai yang sudah berpendidikan Sarjana baik itu Sarjana Strata Satu maupun Sarjana Strata Dua lebih dari 58,70 persen dari total PNS yang ada.

Selanjutnya tabel 2 dibawah ini akan menguraikan jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan jabatan atau eselon.

Tabel 2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan/Eselon pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Keadaan 03 Januari 2023

No	Pegawai/karyawan Menurut Jabatan/Eselon (Orang)						
	Jenis Kelamin	Eselon					Jumlah
		V	IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-laki	-	12	4	-	-	16
2	Perempuan	-	-	-	1	-	1
Jumlah		-	12	4	1	-	17

BAB II

PERENCANAAN STRATEJIK

2.1. VISI DAN MISI

Perencanaan pembangunan daerah hendaknya disesuaikan dengan paradigma baru dan memperhatikan keseimbangan dalam kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan aparatur pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten Lombok Timur kurun waktu tahun 2018-2023 adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal”.

Dari Visi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penjelasan Visi :

- Kata ***“Pelayanan Transportasi Yang Handal”*** : mengandung pengertian bahwa kualitas pelayanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, efektif dan efisien, mencukupi kebutuhan dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur khususnya dan wilayah NTB pada umumnya baik di sektor darat, laut maupun udara.

Untuk mencapai Visi diatas, maka **Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur** adalah :

1. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Transportasi;
2. Meningkatkan Pelayanan Transportasi;
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
4. Meningkatkan Jaringan Pelayanan Jasa Transportasi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat dan laut kepada masyarakat Lombok Timur.

2.2. TUJUAN

Tujuan secara umum yang ingin di capai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam perancangan dan pengendalian pembangunan daerah adalah :

- a. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dibidang perhubungan;
- b. Menciptakan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Laut yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu;
- c. Mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan Tertib Berlalu Lintas.

2.3. STRATEGI

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan. Strategi diwujudkan dalam sasaran dan kebijakan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dibidang Perhubungan;
- b. Terciptanya Lalu Lintas Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu;
- c. Terwujudnya sadar berlalu lintas di jalan.

Adapun kebijakan dari Dinas Perhubungan untuk mendukung sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan/pengembangan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat dan Laut;
- b. Peningkatan Pelayanan Jasa Transportasi Darat dan Laut;
- c. Peningkatan/pengembangan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat dan laut;

- d. Peningkatan Pembinaan Bidang Transportasi Darat dan Laut;
- e. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia Dibidang Transportasi Darat dan Laut;
- f. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan;
- g. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria Bidang Perhubungan;
- h. Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Bidang Perhubungan.

2.4. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai yaitu **“Mengembangkan Sistem Pelayanan Transportasi Darat dan Laut Yang Tangguh Berbasis Teknologi dan Handal”**, dalam program kerja Tahun Anggaran 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dengan prioritas program yang diarahkan pada :

2.4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program yang menunjang dalam pelaksanaan peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Terpenuhinya Kebutuhan operasional kantor, Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat, menyediakan dokumen pelaporan yang otentik, menyiapkan data dan informasi yang akurat tentang

asset dan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, meningkatkan sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.4.2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan peningkatan pelayanan Angkutan, tertib lalu lintas dan keselamatan di jalan, pengembangan rencana Induk LLAJ, pengelolaan angkutan dan terminal, tertanganinya permasalahan LLAJ serta pengelolaan dan pembinaan perparkiran yang lebih baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Peningkatan hasil pendapatan daerah dimana peningkatan pelayanan dan kualitas pengujian kendaraan bermotor terus ditingkatkan dan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang dan barang wajib

melakukan uji kendaraan 2 (dua) kali dalam setahun untuk meningkatkan kelaikan kendaraan bermotor di jalan.

Dari program yang sudah ditetapkan diatas, diuraikan kembali dalam kegiatan yang terukur dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023. Pagu Anggaran Belanja Langsung yang tersedia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp.6.844.686.760,- (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) yang

terbagi habis untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Dengan keterbatasan pagu anggaran, pembagian pembiayaan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan yang dibahas melalui pertemuan seluruh unit kerja yang ada di Dinas Perhubungan dan menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung pada pelayanan kebutuhan masyarakat.

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NOMOR			URAIAN	PAGU (Rp)
P	K	SK		
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.152.186.760
	01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.012.203.320
		01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.933.803.320
		01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.400.000
	01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.390.000
		01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.740.000
		01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.650.000
	01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.989.133.440
		01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.400.000
		01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.866.733.440
	01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.460.000
		01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.460.000

NOMOR			URAIAN	PAGU (Rp)
P	K	SK		
02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	692.500.000
	02.2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	492.500.000
		02.2.02.004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	492.500.000
	02.2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.000.000
		02.2.05.003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	19.161.000
		02.2.05.004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	65.000.000
		02.2.05.007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	115.839.000
JUMLAH				6.844.686.760

BAB III
RENCANA KINERJA

3.1. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 Tahun;

1.1.2. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD.

1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.2.1. Terciptanya keamanan perkantoran dengan adanya penerangan bangunan kantor;

1.2.2. Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan dinas;

1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.1. Terpenuhinya jasa pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik;

1.3.2. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1. Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.1.1. Terpeliharanya Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;

2.2. Pengujian Kendaraan Bermotor

2.2.1. Tersedianya Data Kendaraan Wajib Uji di wilayah Kabupaten/Kota;

2.2.2. Terpenuhinya Jumlah Kartu Uji/SIM PKB yang dibutuhkan selama 1 (satu) Tahun;

2.2.3. Tersosialisasikannya SOP Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji kepada masyarakat;

3.2. PENGUKURAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program-program yang ditetapkan dalam Rencana Strategik merupakan cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dan akan dilakukan kegiatan yaitu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok Masukan (Input), Keluaran (Output) dan Hasil (Outcomes).

Rencana kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan : Tersedianya dana	Rp	3.933.803.320
			Keluaran : : JUmlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	OB	588
			Hasil : Tebayarnya Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	%	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Masukan : Tersedianya dana	Rp	78.400.000
			Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Dokumen	12
			Hasil : Belanja yang dilakukan Sesuai rencana	%	100
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan : Tersedianya dana	Rp	17.740.000
			Keluaran : Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	95
			Hasil : Tersedianya alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran	%	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan : Tersedianya dana	Rp	1.650.000
			Keluaran : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	156
			Hasil : Tersedianya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dibutuhkan	%	100
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan : Tersedianya dana	Rp	122.400.000
			Keluaran : Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4
			Hasil : Tersedianya Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan pelayanan	%	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan : Tersedianya dana	Rp	1.866.733.440
			Keluaran : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12
			Hasil : Tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	%	100
	Pemeliharaan Barang Milik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Masukan : Tersedianya dana	Rp	131.460.000

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	27	
			Hasil : Surat Kendaraan Dinas Operasional dalam keadaan hidup dan siap pakai	%	100	
PENYELENGGRAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Masukan : Tersedianya dana	Rp	492.500.000	
			Keluaran : Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	Unit	80	
			Hasil : Terciptanya perlengkapan Jalan yang memadai	%	80	
	Pengujian Kedaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Masukan : Tersedianya dana	Rp	19.161.000
				Keluaran : Tersedianya Data dan Informasi Kendaraan Wajib Uji	Dokumen	1
				Hasil : Terdatanya Kendaraan Wajib Uji sebagai target retribusi	%	80
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Masukan : Tersedianya dana	Rp	65.000.000
				Keluaran : Tersedianya Bukti Lulus Uji sesuai kebutuhan	Set	5500
				Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Kartu Wajib Uji 1 Tahun	%	80
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Masukan : Tersedianya dana	Rp	115.839.000
				Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Siapa Pakai	Unit	80
				Hasil : : Terpeliharanya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	%	80

Selong, 03 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



BAIQ FARIDA APRIANI, S.Sos.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 196704220198803 2 008

BAB IV

JADWAL PELAKSANAAN

4.1. PELAKSANA BIDANG SEKRETARIAT

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JADWAL
1	2	3	4
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Januari – Desember 2023
	Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Januari – Desember 2023
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Januari – Desember 2023
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Januari – Desember 2023
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Januari – Desember 2023
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Januari – Desember 2023

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Januari – Desember 2023
--	---	---	-------------------------

4.2. PELAKSANA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN dan BIDANG PENGEMBANGAN DAN TEKNIK

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JADWAL
1	2	3	4
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Januari – Desember 2023
	Pengujian Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Januari – Desember 2023
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Januari – Desember 2023
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Januari – Desember 2023

B A B V

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023 disusun dan dikembangkan untuk mengarahkan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif dan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja juga sebagai bahan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023.

Dalam kerangka yang lebih luas maka Rencana Kerja sebagai alat kendali dan alat penilai kualitas kinerja, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang baik antar bidang.

Akhirnya kita harus benar-benar menyadari bahwasanya manusia hanya bisa merencanakan akan tetapi kembali lagi kepada pribadi masing-masing untuk membangun Lombok Timur kearah yang lebih baik diperlukan perencanaan yang baik dan *Political Will* dari pengambil kebijakan untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan agar hasilnya lebih optimal serta dukungan yang kuat dari segenap keluarga besar Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur untuk mendukung apa yang menjadi kebijakan pimpinan dan tertuang dalam semua dokumen perencanaan yang ada.

Akhirnya kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa yang akan datang sehingga dapat tercapai hasil yang lebih baik.

Selong, 03 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



BAIQ FARIDA APRIANI, S.Sos.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670422 198803 2 008